

PERAN *United State Agency International Development* (USAID) DALAM KONSERVASI LAUT DI KEPULAUAN ANAMBAS, KEPULAUAN RIAU

Oleh:

Nilam Sari

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA
nilam.sari0468@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

This is a study about the role of United Nation Agency International Development in marine conservation Anambas Island, Riau Island Province. USAID is United Nation's federal agencies that assist to other countries on the event of democracy, environment, gender, education etc. USAID has been engaged in marine conservation development in Anambas Island.

This script uses the conceptual base with the concept of international cooperation where in USAID and Anambas become the focus of study. It is also supported by the range or nation-state, pluralism perspective and Green theory. The concept directs to the qualitative method and literature study as the resource of the information.

The role performed by USAID were give a fund grant to Indonesia, cooperation with Indonesia's MPAG and zoning or mapping conservation region in Anambas Island, Riau Island Province.

Keyword : *Role, USAID, conservation.*

I. Pendahuluan

Tulisan ini mendeskripsikan penelitian mengenai peran USAID (*United State Agency International Development*) dalam mengkonservasi laut di kepulauan Anambas provinsi Kepulauan Riau. Upaya ini dilakukan melalui program kerja MPAG (*Marine Protected Areas Governance*) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya di laut Kepulauan Anambas dan sekitarnya.

Melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut

sekitar, diantara dan didalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia negara kepulauan, telah diakui oleh dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ketiga yang dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.¹ kemudian di ratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang no. 17 tahun 1982 (UNCLOS 1982). Berdasarkan UNCLOS 1982 luas wilayah laut Indonesia 5,9 juta km² terdiri dari 3,2 km² perairan territorial dan 2,7 km² perairan zona ekonomi eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landasan

¹ lasabuda, Ridwan. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan

continental (*Continental Shelf*), hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The Biggest Archipelago In The World*).²

Untuk melestarikan serta melindungi KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan republik Indonesia bersama *United State Agency International Development* mencanangkan program *Marine Protected Area Governance* (MPAG) di kepulauan Anambas. USAID sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap masa depan dunia memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia melalui MPAG untuk merealisasikan komitmen pendirian kawasan 20 juta hektare kawasan konservasi laut.³ MPAG sendiri merupakan konsorsium dari lima LSM internasional diantaranya *Conservation International (CI)*, *Coral Triangle Centre (CTC)*, *The Nature Conservancy (TNC)*, *Wildlife Conservation Society (WCS)* dan *Wild Wide Fund for Nature (WWF)*.

Pada tahun 2014 Anambas menjadi lokasi perencanaan pengelolaan dan zonasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034.⁴ Anambas menjadi salah satu kawasan konservasi laut karena dinilai memiliki potensi wisata laut yang baik. Ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebagai kawasan konservasi laut merupakan hasil dari kegiatan indentifikasi calon kawasan konservasi dan laut sekitarnya

² *Ibid* hlm.94

³ Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*, <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabarur/233-koleksi-dokumen-mpag> diakses pada 14 Juli 2017 pukul 11:30

⁴ *ibid*

⁵ *Anambas Kawasan Konservasi Perairan*. Lihat <http://haluankepri.com/anambas/14671-2014-anambas-kawasan-konservasi-perairan.html>. Diakses pada 15 Juli 2017 pukul 09:30.

oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.⁵

Sebelum adanya MPAG, program MPA di lautan Anambas telah didirikan oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan No.35 tahun 2013. Keputusan tersebut dilaksanakan pada Pekanbaru National Water Conservation Workshop (PNWCW).⁶ Keefektifan MPA akan mendukung keberlangsungan sumber daya ikan dan peningkatan ekonomi Anambas melalui *ecotourism*.⁷

Sebagai bentuk keberlanjutan dari program MPA, USAID membentuk program kerja MPAG dengan mendirtibusikan dana kepada pemerintah Indonesia agar bisa menjaga laut yang telah dikonservasi di lautan Anambas. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan kementerian perikanan dan kelautan namun juga pemerintah kabupaten anambas.

Kerangka Dasar Teori

Perspektif Pluralis

Perpsektif pluralis merupakan pemikiran para ahli seperti Robet O. Kohane, Joseph, S. Nye, Mattew Paterson dan Cristian Reus-smit. Perpsektif Pluralisme memiliki beberapa asumsi sebagai dasar pemikiran khususnya dalam bidang keilmuan hubunga internasional. Adapun beberapa asumsi tersebut adalah:⁸

1. Aktor Non Negara Merupakan Kenyataan Yang Paling Penting Dalam Hubungan Internasional.

⁶ Lily, dkk. *Linking Indicators For Ecosystem Approach To Fisherier Management And Management Of Marine Protected Ares Effectiveness In Anambas Island, Indonesia*. AACL Bioflux, 2015 Vol.8, issue 6. Hlm.1049

⁷ Gell F. R., Robert C. M., 2003. *The Fishery Effect S Of Marine Reserves And Fishery Clousure*. <http://WorldWildlife> diakses pada 15 Juli 2017 pukul 12:12.

⁸ M. Saeri. 2012 “*Teori Ilmu Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatic*”. Jurnal transnasional universitas riau. Vol.3 No.2, Februari 2012. Hlm. 11

Organisasi internasional merupakan sebagai contoh dari asumsi ini, dapat menjadi actor mandiri sebagai haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, birokrat dan berbagai kelompok sebagai pengaruh untuk mengambil kebijakan internasional. Contoh lain selain organisasi internasional adalah MNC yang tidak dapat dikatakan actor marjinal, karena dapat membuat kondisi ketergantungan dalam hal perekonomian dunia.

2. Negara Bukan Actor Tunggal

Sebuah negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit yang terintegritas. Negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan suatu negara. Negara bangsa bukanlah entitas yang terintegritas karena negara dan actor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktifitas dan hubungan internasional, dan sering menimbulkan dan menerima akibat dari aktifitas internasionalnya.

3. Negara Bukan Actor Yang Rasional

Para penganut pluralis menyanggah pendapat kaum realis dalam hal negara sebagai actor rasional. Bagi penganut pluralis negara merupakan actor yang tidak rasional, kebijakan suatu negara merupakan hasil tawar-menawar dan kompromi antar actor yang berbeda. Bagi pemikir pluralis, proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses rasional melainkan proses social. Proses pengambilan kebijakan merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang dapat mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin dicapai.

4. Agenda Politik Sangat Luas.

Kelompok pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional karena agenda politik internasional sangat luas dan bervariasi, tidak hanya militer namun juga sosial, ekonomi, kemanusiaan dan lainnya. Bahkan, tiga puluh tahun terakhir isu ekonomi dan social menjadi isu terdepan dalam perdebatan internasional.

Green Thought

Teori hijau atau *green thought* memiliki landasan yang kuat mengenai betapa pentingnya lingkungan di bahas dalam hubungan internasional, sebagai contoh Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebih. Seperti pada artikel Owen greene, dalam artikelnya beliau mengibaratkan tentang memancing ikan. Seperti yang kita ketahui, jaman berganti dan terus maju menuju peradaban modern. Begitu juga dengan kasus memancing ikan ini. Pada jaman dahulu, kita memancing ikan menggunakan cara yang sederhana, tetapi semakin hari semakin beragam cara memancing dan peralatannya pun semakin canggih. Polusi laut juga semakin sering terjadi. Itulah salah satu cara menangkap ikan secara instan dan banyak tapi merusak lingkungan. Selanjutnya adalah tentang lapisan ozon yang semakin hari semakin menganga lebar. Dulu, topik lapisan ozon tidak begitu dihiraukan oleh banyak negara, tetapi setelah para ilmuwan meneliti dan memberikan buktinya maka, masalah ini menjadi masalah global dan serius.⁹

Jill Stean dan Llyoid Pettiford dalam bukunya yang berjudul *International Relations : Perspective and Theme* mengemukakan *Green Thought* bertolak dari pandangan akan penolakan terhadap *arthropocentric*, yaitu pemusatan pada manusia. Masalah lingkungan yang muncul karena melihat sejauh mana hubungan antara perilaku manusia dengan alam Penyebaran masalah lingkungan ini pun cepat

⁹ Greene, Owen, 2001. *Environmental issues*, in; John Baylis & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford, pp. 387-414.

dan tidak mengenal batas Negara dan yang terpenting proses pemulihannya tidak mudah dan butuh waktu dan proses yang panjang. *Green Thought* mempresentasikan suatu tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah terhadap lingkungan hidup.¹⁰

Green thought berkaitan dengan *ecologisme* yaitu sebuah ideologi, *ecocentric*, tidak terlalu berfokus pada kepentingan manusia. *Green Thought* atau ekologi menuntut perubahan-perubahan radikal (mendasar) dalam hal organisasi sosio-politik dan penghargaan bagi spesies non-manusia. *Green Thought* tidak perlu menjadi sebuah posisi yang tetap tetapi secara umum terlibat dalam ;¹¹

- a. Penolakan terhadap pandangan antroposentris.
- b. Suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh diatas kualitas kehidupan.
- c. Adanya keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hukum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya.
- d. Sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi dan teknologi dalam sistem ideologi nilai.
- e. Suatu pemisahan antara kebutuhan-kebutuhan vital dan non-vital.
- f. Suatu etika yang berdasarkan teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non manusia.
- g. Sebuah komitmen aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang hijau yang mencakup promosi alternatif, nilai-nilai dan suatu desentralisasi kekuasaan.

Green Thought menjelaskan mengenai tantangan mendasar dan penting yang ditemui dalam isu lingkungan dan penyelesaian terhadap

masalah lingkungan hidup. Secara mendalam, perspektif ini membahas sampai kepada sistem negara, struktur utama perekonomian global, institusi-institusi global, dan bahkan teknologi modern yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, dalam beberapa hal dianggap kurang tepat dan dianggap sebagai penyebab dari degradasi lingkungan hidup secara global, padahal diharapkan sebagai pemberi solusi atas krisis lingkungan yang sedang dialami.¹²

Tidak dapat dipungkiri terkadang solusi-solusi yang digunakan mulanya untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, justru menambah permasalahan lingkungan hidup. Oleh karena itu *Green Thought* menuntut adanya suatu restrukturalisasi radikal dari berbagai aspek organisasi manusia, misalnya mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti konsumerisme, menata sistem pengelolaan lingkungan dengan manajemen lingkungan yang baik.¹³

II. Pembahasan

Luas Laut Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya berada diantara 6⁰ sampai 11⁰ dan 92⁰ sampai 145⁰ terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 17.504 pulau. Tiga per empatnya adalah wilayah laut atau sekitar 5,8 juta km² dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada.¹⁴

Berdasarkan UNCLOS 1982 luas wilayah laut Indonesia 5,9 juta km² terdiri dari 3,2 km² perairan territorial dan 2,7 km² perairan zona ekonomi eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landasan continental (*Continental Shelf*), hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai

¹⁰ Faisyal Rani, "Perspektif *Green Thought* Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)". Jurnal Transnasional Universitas Riau, Vol.4, No. 2, Februari 2013. Hlm. 871-873

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Iasabuda, Ridwan. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan republik Indonesia. Jurnal ilmiah platax vol. 1-2, th 2013 hlm. 93

negara kepulauan terbesar di dunia (*The Biggest Archipelago In The World*).¹⁵

Nilai Strategi Kepulauan Anambas

Kepulauan Anambas memiliki strateginitas yang cukup tinggi dalam permasalahan politik luar negeri Indonesia maupun negara sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh letak dan potensi alam yang ada di Kepulauan Anambas.

Potensi Kepulauan Anambas

Kepulauan Anambas sebagai kepulauan yang terluar memiliki potensi yang besar baik dalam kondisi alam, laut maupun tambangnya. Berdasarkan kondisi geomorfologi, Kepulauan Riau terletak pada bagian continental yang dikenal dengan nama paparan sunda atau bagian kerak benua Asia. Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala yang merupakan pulau-pulau yang ada di Anambas memiliki potensi batuan seperti batuan granit dan biji besi.¹⁶ Selain batuan grannit Kepulauan Anambas juga terdapat cekungan tersier yang kaya akan minyak dan gas bumi. Cekungan tersebut biasa disebut sebagai cekungan Natuna Barat.¹⁷

Permasalahan Laut China Selatan bagi Natuna dan Anambas

Konflik di Laut China Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Sparty, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke-20, dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecambuknya perang dunia II, Jepang mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Sparty sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya PD II, Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut dan diikuti oleh Filipina yang membutuhkan

sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan dari kawasannya. Sejak 1970 klaim terhadap kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan penemuan dan hukum internasional. Perkembangan pertama menyangkut ditemukannya ladang minyak yang diperkirakan cukup banyak di kawasan tersebut berdasarkan survey geologi yang dilakukan para peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris. Penemuan ini sudah tentu membuat harga kepulauan dan pulau kecil serta batu karang di kawasan tersebut meroket. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari UNCLOS (*United Nation Conference on The Law of The Sea*).¹⁸

Gambar 3.2 Peta Kepulauan Anambas Berbatasan Langsung Dengan laut China Selatan



Sumber:

<http://www.tribunnews.com>

Letak goeografis Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhadapan langsung dengan laut China Selatan membuat Republik Indonesia harus mengantisipasi dari emansipasi hegemoni Tiongkok. Tidak diragukan lagi mengapa

¹⁵ *Ibid* hlm.94

¹⁶ *Batuan dan logam* lihat <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/199-batuan-logam-dan-peluang-investasi> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 06:49 wib.

¹⁷ *Profil geologi* lihat <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data->

[informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/197-profil-geologi](http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/197-profil-geologi) diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 06:50 wib.

¹⁸ *Status dan kedudukan laut china selatan menurut hukum laut internasional*, lihat <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56443/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 18 oktober 2017 pukul 13:54 wib

Natuna dan Anambas sangat menguntungkan jika diberdayakan karena potensi alam dan pariwisata yang tinggi. *Nine Dash Lines* versi Tiongkok masih menjadi pertanyaan bagi Indonesia karena menyentuh garis ZEE Kabupaten Natuna, selain itu kapal-kapal nelayan yang berbendera Tiongkok juga sering tertangkap masuk ke wilayah Indonesia.¹⁹

Sejarah Terbentuknya USAID dan Hubungannya Dengan Amerika Serikat

United State Agency For Internasional Development (USAID) merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy sebagai bagian dari undang-undang tentang bantuan luar negeri tahun 1961. USAID merupakan organisasi bantuan luar negeri Amerika Serikat dimana USAID tersebut menjadi perhatian yang mendasar, untuk membantu negara yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan serta membantu dalam bidang pembangunan sosial di negara tersebut.²⁰

Dalam pembentukan USAID sebagai lembaga pemerintahan November 1961, John F Kennedy menyampaikan dalam pidatonya, ” *There is no escaping our obligations: our moral obligations as a wise leader and good neighbor in the interdependent community of free nations – our economic obligations as the wealthiest people in a world of largely poor people, as a nation no longer dependent upon the loans from abroad that once helped us develop our own economy – and our political obligations as the single largest counter to the adversaries of freedom.* ”²¹

Dalam pernyataan tersebut terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam membentuk USAID sebagai lembaga yang dapat menjadi badan bantuan bagi seluruh masyarakat dunia. Adapaun tujuan utama terbentuknya USAID adalah “ *ending extreme poverty and promoting the development of resilient, democratic societies that are able to realize their potential* ”.²² Selain demokrasi, USAID juga bergerak di bidang *Climate Change*, hal ini terdapat pada program kerja USAID. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tujuan USAID di bidang lingkungan:

1. *Supporting land tenure policies and resource rights, giving people the right to own and manage natural resources responsibly;*
2. *Fighting deforestation and planting trees, so that forests continue to provide clean water and air, improve agricultural productivity, slow the rate of climate change, counter desertification, and support economic growth;*
3. *Protecting biodiversity, so that people don't lose essential goods and services generated by intact and functional ecosystems, and species aren't lost to extinction; and*
4. *Mitigating and adapting to the effects of climate change, so countries can grow without harming the environment while strengthening their resilience to warmer temperatures and weather shocks.*²³

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa USAID merupakan lembaga

¹⁹ Ursula Florene. *Apa dampak keputusan arbitrasi bagi Indonesia?*. Lihat www.rappler.com diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 14:28 wib.

²⁰ *About USAID* lihat <https://www.usaid.gov> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 17:29 wib

²¹ *Celebrating Fifty Years of Progress*. Lihat <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 20:45 wib.

²² *USAID's Vision and Mission*. lihat <https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-values> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 20:46 wib

²³ <https://www.usaid.gov/what-we-do/environment-and-global-climate-change> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 20:54 wib

federal Amerika Serikat yang dibentuk untuk mengembangkan paham demokrasi melalui kegiatan sosial, lingkungan, politik dan lain sebagainya.

Kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Konservasi Anambas

Setelah menjelaskan letak kepulauan anambas, sejarah USAID dan apa hubungannya dengan Amerika Serikat serta sekilas mengenai sengketa laut China Selatan, agar lebih memahami bagaimana nilai strategis Kepulauan Anambas bagi konservasi laut khususnya bagi USAID dan Amerika Serikat, berikut penulis akan menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dibawah lambang USAID dalam konservasi laut Anambas.

Indonesia Sebagai Negara Demokrasi

Demokrasi adalah sejatinya Indonesia. Berbagai dokumen sejarah menjelang Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa semangat mendirikan negara Republik Indonesia didasari oleh sedikitnya 3 hal, yaitu keadilan sosial, persamaan kedudukan warga negara dan, tentu saja, kebebasan warga negara. Seperti dikatakan oleh Soekarno pada Pidato Pancasila di depan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945.²⁴

Salah satu terpilihnya Indonesia menjadi tempat berlangsungnya program USAID adalah dikarenakan Indonesia menganut paham demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari visi USAID yang salah satunya menyatakan, *“By helping societies protect the basic rights of citizens, we prevent conflict, spur economic growth and advance human dignity. Countries with democratic freedoms are more just, peaceful and stable-and their citizens can fulfill their potential. Through its democracy, human rights and governance programs, the United States*

*remains committed to protecting and advancing our most cherished values. We are focused on:*²⁵

1. *Democratic Governance - Building open, responsive, and accountable institutions and processes that serve the needs and preferences of the public.*
2. *Participation - Ensuring that all have the opportunity to participate and have a voice in how they will be governed.*
3. *Fair Competition - Promoting free, transparent and fair political competition so that citizens' preferences are represented.*
4. *Civil Society and Independent Media - Defending citizens' rights of association and expression, so that they can play a role in their country's future.*
5. *Justice - Holding institutions and people responsible to the rule of law”.*

Perusahaan Amerika dan Inggris di Kepulauan Anambas

1 ConocoPhillips

ConocoPhillips adalah perusahaan energi yang integral dalam skala internasional. ConocoPhillips adalah perusahaan energi terintegrasi ketiga terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar dan cadangan terbukti minyak dan gas. Conocophillips merupakan pengilang terbesar kedua di Amerika Serikat. Secara internasional, dalam kategori perusahaan yang tidak dikendalikan pemerintah, ConocoPhillips mempunyai cadangan terbukti terbesar kelima di dunia; dan berdasarkan

²⁴ Martin Manurung. *Melacak Jejak Dan Prospek Sosial Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal social demookrasi Vol. 11 No. 4 Juli 2014 hlm.4

²⁵ <https://www.usaid.gov/democracy>

kapasitas minyak mentah adalah pengilang terbesar keempat di dunia.

ConocoPhillips terkenal di seluruh dunia dengan keahlian teknologi di bidang eksplorasi dan produksi di laut dalam, eksploitasi dan manajemen reservoir, teknologi seismik 3-D, *petroleum coke upgrading* kelas tinggi, dan sulfur removal.

Bermarkas di Houston, Texas, ConocoPhillips beroperasi pada lebih dari 40 negara. Perusahaan ini mempunyai sekitar 38.300 karyawan di seluruh dunia dan aset bernilai USD 164 miliar. ConocoPhillips terdaftar di Bursa Saham New York (*New York Stock Exchange*) dengan simbol "COP".

2. PremierOil

PremierOil merupakan migas dunia yang banyak beroperasi di negara-negara luar, seperti Falkland Island, Norwegia, Pakistan, Mauritania, Inggris, Vietnam, Indonesia. Premier Oil Indonesia adalah operator dari West Natuna Sea Block A, dan telah memproduksi minyak lebih dari satu dekade. dan yang baru ditemukan adalah lapangan Tuna. Premier mengakuisisi areal operasi pertama di Indonesia - Natuna Sea Block A - termasuk ladang minyak Anoa pada tahun 1996.²⁶

3. Marathon Petroleum Corporation

Marathon Petroleum Corporation adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang produksi, penyulingan dan pemasaran minyak dan gas bumi. Perusahaan ini dibentuk dari Marathon Ashland Petroleum, LLC pada 1 September 2005 yang bermarkas di Findlay, Ohio, Amerika Serikat sebagai anak perusahaan dari Marathon Oil. Pada tahun 2013, Marathon Oil Corporation masuk dalam daftar *Fortune*

500, sebuah daftar peringkat perusahaan berdasarkan pendapatan kotornya yang dibuat oleh majalah *Fortune* setiap tahun. Marathon Oil Corporation berada dalam peringkat 188 (sebelumnya peringkat 174) dengan pendapatan sekitar \$15.320 juta, keuntungan sebesar \$1.753 juta, dan total aset sebesar \$35.620 juta. Marathon Oil Corporation fokus pada eksplorasi, produksi, dan pemasaran *hydrocarbon* cair dan gas alam, serta produksi dan pemasaran produk-produk turunan gas alam.²⁷

Amerika Serikat dan Konflik Laut Cina Selatan

Amerika Serikat (AS) melibatkan diri dalam sejarah yang cukup panjang pada konflik dan peperangan yang terjadi di Kawasan Timur Tengah dan di Afganistan seperti dalam konflik berkepanjangan yang terjadi antara Arab dan Israel serta dalam peperangan melawan terorisme. Dalam tahun terakhir ini AS juga sangat memperhatikan kawasan Asia terutama dalam strateginya untuk merespon kebangkitan dari Cina. Terutama sekali sejak naiknya Barack Obama sebagai presiden, persoalan yang terjadi di Laut Cina Selatan menjadi perhatian utama bagi AS bahkan menjadi fokus poin bagi AS dalam strateginya yang dikenal dengan *Asia's Rebalancing*. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pidatonya di East West Center Hawaii bahwa:

*"Masa depan AS sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan sangat tergantung pada peran AS. Dengan demikian AS harus memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama sekali dalam kekuatan maritim."*²⁸

Mulai intensnya AS untuk melibatkan diri di kawasan Asia menunjukkan bahwa secara

²⁶ <http://www.premier-oil.com/premieroil/operations/indonesia> diakses pada 21 Oktober 2017 pukul 14:37 wib

²⁷ www.marathonoil.com

²⁸ Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton Est Wets Enterm Honolulu, Hawaii. 14 January 2010. dalam Ralf Emmers, *The US rebalancing strategy: Impact on the South China Sea*. National Security College, Australian National University

strategis, politik dan ekonomi, AS tidak bisa melepaskan diri dari Asia. AS dibawah Obama tidak pernah menurunkan perhatiannya pada kawasan yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggal dalam dua puluh tahun ke depan, serta menjadi kawasan yang penuh tantangan bagi AS, dalam artikel politik luar negerinya yang sangat berpengaruh, Hillary Clinton menjelaskan bahwa kembalinya perhatian strategis AS ke kawasan Asia sangat sesuai dengan logika keseluruhan dari usaha global untuk menyelamatkan kepemimpinan global AS.²⁹ Keputusan Amerika untuk membentuk poros diplomasi dan militer di kawasan Asia Pasifik sudah ditunjukkan terutama sekali terhadap Beijing, sebagai respon terhadap meningkatnya ambisi kawasan Cina. Ada dua prinsip kepentingan AS dalam konflik LCS yakni Akses dan stabilitas.

Pertama, AS memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses pelayaran yang tanpa hambatan di perairan LCS. Dari pandangan Washington, semua negara sangat membutuhkan dan akan menikmati adanya kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. *Kedua*, AS memiliki kepentingan terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sama halnya seperti kebebasan pelayaran, keamanan dan stabilitas juga akan menjadi penopang utama kesejahteraan baik di Asia dan Amerika. Bagi AS kalau kawasan ini dilanda konflik maka hal ini akan menghambat dan menjauhkan warga dari kesejahteraan karena akan melangkakan sumberdaya, menurunnya volume perdagangan dan investasi intra-regional.

Keterlibatan Indonesia Dalam Konflik Laut China

Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen konflik di LCS, adalah sesuatu yang

didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah dan semakin membutuhkan pertimbangan keterlibatan UE.³⁰ timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik.

Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam kontribusinya terhadap persoalan di laut Cina Selatan karena, tidak terlibat klaim wilayah yang disengketakan, dan tidak memiliki sejarah konflik mengenai kelautan dengan Cina seperti yang dialami Filipina dan Vietnam. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia adalah posisi netral yang selama ini diambil Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Netral dalam artian bahwa Indonesia tidak pernah secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Amerika Serikat yang ingin membendung pengaruh kekuatan Cina di Kawasan. Indonesia juga tidak melakukan penolakan yang berarti terhadap pendekatan yang dilakukan Cina dalam mengimbangi kekuatan AS.³¹

Dengan modal netralitas ini, Indonesia harus memberikan perhatian khusus pada posisi AS, Cina maupun UE, dalam artian mereka harus mendapatkan prioritas dan dimanfaatkan kontribusinya dalam menuju perdamaian di kawasan. Argumentasi mengenai perlunya hal prioritas terhadap posisi AS, Cina dan UE karena hubungan Cina, Amerika dan UE, nantinya akan memiliki porsi dan dinamika tersendiri di Laut Cina Selatan. Sikap asertif Cina misalnya sudah membawa negara-negara anggota ASEAN yang terlibat konflik untuk selalu mulai memperhatikan persoalan

²⁹ Hillary Clinton, *America's Pacific Century*, Foreign Policy November 2011.

³⁰ Alan C. Tidwell, 1998, "*Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*". London and New York, Continuum, hal.3-8.

³¹ I Nyoman Sudira. 2010. *Konflik Laut Cina Selatan Dan Diplomasi Indonesia Ke Amerika Dan Eropa*. Jurnal Universitas Parahyangan Vol.3 No.2 Hlm. 157-158

keamanan dan stabilitas regional mereka. Perilaku asertif yang ditunjukkan selama ini maka akan semakin menurunkan kredibilitasnya di Asia Tenggara bahkan terbukti bahwa sikap ofensif Cina selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun negara-negara Asia Tenggara juga terlibat perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan Cina, akan tetapi selama Cina bertahan dengan sikap ofensifnya maka mereka tetap meningkatkan hubungan keamanan mereka dengan AS bahkan menerima kehadiran militer AS di kawasan.³²

Kemitraan Indonesia dan USAID (Amerika Serikat)

Hubungan RI-Amerika Serikat (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS.³³

Pemerintah Indonesia dan the *United States Agency for International Development* (USAID) telah menyepakati hibah USAID melalui *Strategic Plan* periode 2009-2014 yang meliputi lima bidang program, yaitu pendidikan, pemerintahan dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Implementasi hibah bagi tiap program tersebut selanjutnya dikuatkan melalui penandatanganan *Assistance Agreement* (AA).

Bantuan hibah USAID juga diberikan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh

paska tsunami yang dituangkan dalam dokumen *Strategic Objective Grant Agreement* (SOAG) to *Support Tsunami Recovery and Reconstruction* yang ditandatangani Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dan USAID pada 7 Juli 2005 dengan nilai US\$ 371.3 juta.³⁴

Program Kerja USAID dalam Konservasi Laut Indonesia

Untuk melestarikan serta melindungi KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan republik Indonesia bersama *United State Agency International Development* mencanangkan program *Marine Protected Area Governance* (MPAG) di kepulauan Anambas. USAID sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap masa depan dunia memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia melalui MPAG untuk merealisasikan komitmen pendirian kawasan 20 juta hektare kawasan konservasi laut.³⁵ MPAG sendiri merupakan konsorsium dari lima LSM internasional diantaranya *Conservation International* (CI), *Coral Triangle Centre* (CTC), *The Nature Conservancy* (TNC), *Wildlife Conservation Society* (WCS) dan *Wild Wide Fund for Nature* (WWF).

Melalui program ini, berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia tentang pengelolaan kawasan konservasi terdapat 10 lokasi diberbagai daerah Indonesia. 10 lokasi tersebut terdiri dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Propinsi Nusa Tenggara, Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Propinsi Bali, Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, Taman Wisata Perairan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi

³² *Ibid*

³³ Ramadhan. https://www.academia.edu/11243207/Hubungan_Internasional_Amerika_Serikat_dengan_Indonesia diakses pada 24 Oktober 2017 pukul 13:42 wib.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*, <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabarur/233-koleksi-dokumen-mpag> diakses pada 14 Juli 2017 pukul 11:30

Sulawesi Selatan, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Taman Wisata Perairan Kepulauan Padoid dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku.³⁶

Bantuan USAID Dalam Konservasi Laut Anambas

Kesatuan Struktur Kerja USAID dan MPA Indonesia

Untuk melestarikan serta melindungi KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan republik Indonesia bersama *United State Agency International Development* mencanangkan program *Marine Protected Area Governance* (MPAG) di kepulauan Anambas. USAID sebagai badan federal Amerika Serikat yang peduli terhadap masa depan dunia memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia melalui MPAG untk merealisasikan komitmen pendirian kawasan 20 juta hektare kawasan konservasi laut.³⁷

USAID bersama KKP dalam menjalankan MPA memiliki struktur kerja yang jelas. System MPA Indonesia didukung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dengan system perikanan berkelanjutan, peraturan dan kebijakan, kapasitas pembangunan, pengambilan keputusan secara ilmiah, dan pembiayaan berkelanjutan. Semua hal tersebut sebagai faktor yang meng- *support* sistem MPA Indonesia untuk menerapkan konservasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Work stream ini telah dijelaskan dalam Bali MPA Network, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 .

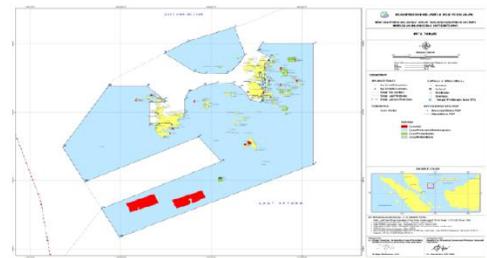
³⁶ *ibid*

³⁷ Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia* ,

Pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Laut Anambas

Kawasan konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dikelola berdasarkan zonasi. Kawasan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya yang dimanfaatkan untuk rehabilitasi. Pembagian zona tersebut telah sesuai dengan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/ MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Rencana pengelolaan dan zonasi di TWP Kepulauan Anambas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Kepmen-Kp/2014. Zona inti : 30.328,58 ha. Zona perikanan berkelanjutan : 1.222.498,99 ha yang terbagi menjadi subzona perikanan budidaya : 7.784,38 ha; subzona perikanan tangkap : 1.214.705,39 ha; subzona perikanan tradisional : 9,22 ha. Zona Pemanfaatan : 9.387,77 ha. Zona Lainnya : 470,85 ha.³⁸

Gambr 4.2 Kawasan Konservasi Anambas



Sumber: Linking Indicators For Ecosystem Approach To Fisherier Management And Management Of Marine Protected Ares Effectiveness In Anambas Island, Indonesia

<http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabarur/233-koleksi-dokumen-mpag> diakses pada 14 Juli 2017 pukul 11:30

³⁸ [kkp.go.id/zonasi-twp-kepulauan-anambas-dan-laut-sekitarnya](http://www.kkp.go.id/zonasi-twp-kepulauan-anambas-dan-laut-sekitarnya) diakses pada 7 oktober 2017 pukul 16:24 WIB.

Hibah USAID Pada Kawasan Konservasi Laut Anambas

Sebelum tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID) untuk menjalankan program konservasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Dalam kerja sama tersebut, AS menggelontorkan hibah senilai 40 juta dolar AS atau setara Rp 532 miliar (kurs Rp 13.300). Program akan dijalankan di 15 Kawasan Konservasi Laut di 13 kabupaten di Maluku dan Papua Barat dengan luas mencapai 6 juta hektare. Di sana terdapat habitat kritis kelautan dan perikanan. Adapun penjagaan spesies penting Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 tersebut meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur.³⁹

Sejak tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar US\$ 40 juta atau sekitar Rp 532 miliar. Dana hibah tersebut diberikan dalam bentuk pengadaan lima proyek dalam program *US Agency for International Development (USAID)* konservasi kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia.⁴⁰ Dana ini digunakan untuk mendukung penambahan jumlah kawasan konservasi laut Indonesia pada tahun 2020 menjadi 20 juta Ha.

IV Kesimpulan

USAID sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap masa depan dunia memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia melalui MPAG untuk merealisasikan komitmen pendirian kawasan 20 juta hektare kawasan konservasi laut. MPAG sendiri

merupakan konsorsium dari lima LSM internasional diantaranya *Conservation International (CI)*, *Coral Triangle Centre (CTC)*, *The Nature Conservancy (TNC)*, *Wildlife Conservation Society (WCS)* dan *Wild Wide Fund for Nature (WWF)*.

Pada tahun 2014 Anambas menjadi lokasi perencanaan pengelolaan dan zonasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034. Anambas menjadi salah satu kawasan konservasi laut karena dinilai memiliki potensi wisata laut yang baik. Ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebagai kawasan konservasi laut merupakan hasil dari kegiatan indentifikasi calon kawasan konservasi dan laut sekitarnya oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Sebelum tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID) untuk menjalankan program konservasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Dalam kerja sama tersebut, AS menggelontorkan hibah senilai 40 juta dolar AS atau setara Rp 532 miliar (kurs Rp 13.300). Program akan dijalankan di 15 Kawasan Konservasi Laut di 13 kabupaten di Maluku dan Papua Barat dengan luas mencapai 6 juta hektare. Di sana terdapat habitat kritis kelautan dan perikanan. Adapun penjagaan spesies penting Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 tersebut meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur.

Sejak tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh dana hibah

³⁹<https://kumparan.com/angga-sukmawijaya/as-gelontorkan-hibah-rp-523-miliar-untuk-konservasi-laut-indonesia> *ibid*

⁴⁰<http://moneter.co.id/10605/kementerian-kkp-terima-dana-hibah-rp-532-miliar-dari-as> *ibid*

dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar US\$ 40 juta atau sekitar Rp 532 miliar. Dana hibah tersebut diberikan dalam bentuk pengadaan lima proyek dalam program *US Agency for International Development (USAID)* konservasi kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Dana ini digunakan untuk mendukung penambahan jumlah kawasan konservasi laut Indonesia pada tahun 2020 menjadi 20 juta Ha.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Alfonsius Gadi Gjou, Josef. “*Pengembangan 24 Wisata Bahari Kabupaten Ende*”, Jurnal Kawistara Vol.3 No. 1, 21 April 2013.

Dani, Hamdan. “*Efektifitas Strategi Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishingoleh Kapal Nelayan Asing Di Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Vol. 2 No. 1 Februari 2015.

Dyer Hugh C. & Mangasarian, Leon, (Editors), 1989, *The Study Of International Relations, The State of the Art*, St. Martin’s Press in association with New York Millenium: Journal of International Studies.

I Nyoman Sudira. 2010. *Konflik Laut Cina Selatan Dan Diplomasi Indonesia Ke Amerika Dan Eropa*. Jurnal Universitas Parahyangan Vol.3 No.2

Lasabuda, Ridwan. “*Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan republik Indonesia*”. Jurnal ilmiah platax vol. 1-2, th 2013

Olivia, Yessi.”*Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat*”, jurnal transnasional vol.3 No.1 juli 2011 hlm.421

Saeri, Muhammad. 2012 “*Teori Ilmu Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatic*”. Jurnal transnasional universitas riau. Vol.3 No.2, Februari 2012.

Lasabuda, Ridwan. “*Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*”. Jurnal ilmiah platax vol. 1-2, th 2013

Lily, dkk. *Linking Indicators For Ecosystem Approach To Fisherier Management And Management Of Marine Protected Ares Effectiveness In Anambas Island, Indonesia*.AACL Bioflux,2015 Vol.8, issue 6.

Gumann dan A. Mullinax. “*The Facilitator Rolewithin Learning Networks At USAID*” knowledge management for development journal Vol.11 No.1: 31-40

Kadi, Achmad, “*Akroalgae Di Paparan Terumbu Karang Kepulauan Anambas*”, Jurnal Natur Indonesia, Vol.12 No.1, Oktober 2009: 49-53.

Pigawati, Bitta “*Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sumberdaya Pesisir Pulau - Pulau Kecil dan Laut Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau*”, dalam jurnal Ilmu Kelautan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Desember 2005. Vol. 10 (4) : 229 -236.

Manurung, Martin. *Melacak Jejak Dan Prospek Sosial Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal social demookrasi Vol. 11 No. 4 Juli 2014 hlm.4

Moeldoko, “*Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan*”, Jurnal Politik Vol. 2 No. 1 November 2012

- Pujayanti Adirini, “Budaya Maritim-Geopolitik dan Tantangan Keamanan Indonesia”, Jurnal maritime Vol.3 No. 1 juni 2011
- Yogolastarob, dan Yudha Kurniawan, 2013, “Ambalat Sebagai Wilayah Kontestasi Indonesia”, Jurnal Global Komunika, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2013, Jakarta: FISIP UPN Veteran Jakarta.
- Buku:**
- Archer, Clive. 1992, “*International Organization*”, Routledge. Chapter 1 definitions and history; Chapter 2 Classification of International Organizations.
- Bowet, D.W 1970. *The law of international institution, 2nd*. Ed. Butterworth: london
- D. Moninja. 2001. “*Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*”. Pusat kajian sumber daya pesisir, institute pertanian bogor.
- Daryanto, Arief. 2007. “*Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya saing Industri Perikanan*”. Bulletin Craby & Starky, Edisi Januari 2007.
- Dam S. 2010. *Politik kelautan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Dam, Syamsuar. 2010, “*Politik Kelautan*”, Cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996,”*Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*”, Jakarta: Pradnya Paramita
- Gell F. R., Robert C. M., 2003. *The Fishery Effect S Of Marine Reserves And Fishery Clousure*. <http://WorldWildlife>
- Limbong, Benhard. 2015. “*Poros Maritim*”. Pustaka Margaretha:Jakarta.
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton Est Wets Enterm Honolulu, Hawaii. 14 january 2010. dalam Ralf Emmers, *The Us rebalancing strategy: Impact on the South China Sea*. National Security College, Australian Ntional University
- Mulyana, Yaya Dan Agus Dermawan. 2008. “*Sekapur Sirih Profil Konservasi Ikan Kini Dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*”. Satuan Kerja Direktorat Konservasi Dan Taman Nasional Laut: Jakarta.
- Mohtar Mas’oed,1990,” *Ilmu Hubungan Internasional*”, Jakarta: LP3ES
- R. Suprpto, *Hubungan Internasional: System, Interasi Dan Perilaku*,(Jakarta: PT Grafindo Persada ,1997)
- Susanto, Adi, Hanoko(ed). 2012. *Progress pengembangan system kawasan konservasi Indonesia*. Coral triangle: Jakarta
- Tidwell, Alan C, 1998, “*Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*”. London and New York, Continuum,
- Theodore A. Columbis dan James H. Wolfe. *Pengantar hubungan internasional*, putra abardin: bandung.
- Website:**
- Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “*Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*” , <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.p>

hp/en/beritabarur/233-koleksi-dokumen-mpag

<http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2555>

Anambas Kawasan Konservasi Perairan. Lihat <http://haluankepri.com/anambas/14671-2014-anambas-kawasan-konservasi-perairan-.html>.

“*Pengelolaan kawasan konservasi laut (Bunga Rampai)*”, Jamaludin Jompa, dkk (ed) Jakarta: kementerian kelautan dan perikanan.

Bilqis Oktaviani Putri, “*Mengenal Organisasi Internasional dan Perkembangannya*” lihat [http://bilqis-oktaviani-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-144208-Organisasi%20Internasional%20\(SOH304\)Mengenal%20Organisasi%20Internasional%20dan%20Perkembangannya.html](http://bilqis-oktaviani-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-144208-Organisasi%20Internasional%20(SOH304)Mengenal%20Organisasi%20Internasional%20dan%20Perkembangannya.html)

Chandra joes koeawan. 2007. Abstrak: *Kajian Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Kepulauan Anambas Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau*. Pasca sarjana institute pertanian bogor.

Definisi organisasi internasional. Lihat <http://www.portal-hi.net/definisi-organisasi-internasional>

Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*, lihat dalam <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabarur/233-koleksi-dokumen-mpag>.

<http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id>

Anambas Kawasan Konservasi Perairan. Lihat <http://haluankepri.com/anambas/14671-2014-anambas-kawasan-konservasi-perairan-.html>.

<https://www.usaid.gov/who-we-are>

www.academic.edu

Letak geografis kepulauan Anambas. Lihat www.korankomunitas.com

kkp.go.id/zonasi-twp-kepulauan-anambas-dan-laut-sekitarnya diakses pada 7 oktober 2017 pukul 16:24 WIB.

www.berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf

Profil Kesehatan Kabupaten Anambas Tahun 2012. Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas 2012.

Nym Ngurah Adisanjaya. *Potensi, Produksi dan Diperairan Laut Indonesia Dan Permasalahannya*. Lihat www.eafm-indonesia.net

“*Profil Kabupaten Kepulauan Anambas*”. <http://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas>

Natural resource management project, environment and development in Indonesia: an input output analysis of natural resource issues, NRMP Report No. 31, 1993

“*Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*.” (2014, Maret 18). Retrieved April 30, 2015, from kemenparekraf: